



Judul : Sikapi Pembantaian Muslim Rohingya, DPR Kirim Delegasi
Tanggal : Selasa, 31 Juli 2012
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Sikapi Pembantaian Muslim Rohingya, DPR Kirim Delegasi

ANGGOTA Komisi I DPR dari Fraksi PKS Almuzammil Yusuf menyatakan, DPR segera mengirim delegasi resmi ke Myanmar untuk melakukan pertemuan dan negosiasi, atau memberikan masukan kepada Pimpinan Parlemen Myanmar, agar pembantaian kaum Muslim Rohingya tidak melebar menjadi isu SARA yang lebih luas.

"Saya sudah sampaikan usulan ke Pimpinan Komisi I dan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) untuk memutuskan pengiriman delegasi resmi DPR ke Myanmar pada sidang paripurna DPR mendatang. Delegasi akan memantau dan melobi parlemen Myanmar agar mendesak pemerintahnya menghentikan konflik di sana," katanya.

Muzzammil juga mendesak

Presiden SBY segera mengambil sikap resmi terhadap persoalan ini melalui forum ASEAN. Karena dalam Piagam ASEAN disebutkan, tujuan ASEAN adalah menjamin rakyat di negara-negara anggota ASEAN hidup damai di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.

"Kami minta Presiden SBY, melalui Menteri Luar Negeri aktif menyelesaikan persoalan etnis Rohingya di forum ASEAN secepatnya. Ini demi menjaga agar konflik Myanmar tidak meluas ke negara lain," pintanya.

Ia berharap, negara-negara ASEAN sepakat melakukan langkah-langkah konkret demi menghentikan aksi kekerasan di Myanmar dan kaum Muslim Rohingya dijamin hak hidupnya.

"Kita juga minta, para pengungsi Muslim Rohingya harus dilindungi dan diupayakan mendapatkan kewarganegaraan yang jelas di bawah koordinasi ASEAN," tutur anggota BKSAP DPR ini.

Ketua PBNU KH Slamet Effendy Yusuf juga mendesak Presiden SBY memberikan bantuan kepada etnis Rohingya yang keadaannya makin memprihatinkan. Pembantian etnis Rohingya, pembakaran perkampungan dan pengusiran mereka dari Provinsi Rakhine, Burma, merupakan aksi yang tidak bisa dibiarkan.

Slamet yang juga Ketua MUI

Pusat ini mengatakan, Indonesia sebagai negara yang dituakan di ASEAN dan sebagai negara Muslim terbesar di dunia, seharusnya mengambil inisiatif menyelesaikan masalah ini. "Sangat tidak elok kalau pemerintah Indonesia hanya menjadi penonton dalam tragedi kemanusiaan ini," ujarnya.

Ia berharap, dalam waktu dekat, SBY melakukan upaya diplomatik konkret, baik secara bilateral maupun multilateral. Yang penting, pelanggaran prinsip kemanusiaan ini segera diakhiri. PBNU berharap pemerintah berperan aktif dalam masalah ini.

Slamet juga mengimbau, OKI

(Organisasi Konferensi Islam) memperhatikan tragedi ini secara serius. Kata dia, OKI harus melakukan langkah konkret melindungi etnis Rohingya, agar tidak terus-menerus menjadi sasaran kebiadaban Junta Militer Myanmar. OKI juga harus mendesak PBB menjatuhkan sanksi tegas pada pemimpin Myanmar.

"Ajukan mereka ke pengadilan internasional atau International Criminal Court (ICC) dengan tuduhan telah melakukan pembersihan terhadap genoside etnis Rohingya, secara sistemik," tegas bekas anggota Komisi I DPR ini. ■ HPS